

JURNALIS

Menyusuri Jalan Fiskal antara Visi Misi Paslon Bupati Pangandaran dalam Menyikapi Defisit Anggaran

N.Suryana Saputra - PANGANDARAN.JURNALIS.ORG

Oct 22, 2024 - 05:41



Tedi Yusranda N analisis kritis pegiat Sarasa Pangandaran

PANGANDARAN - Dalam menghadapi tantangan defisit anggaran yang mencapai Rp. 311 Milyar, dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran menawarkan strategi berbeda. Kepada Media Jurnalis Nasional

Tedi Yusnanda N, pegiat Sarasa Pangandaran, memberikan pandangannya mengenai visi misi kedua pasangan calon, khususnya terkait solusi dalam mengatasi masalah keuangan daerah tersebut, Senin (21/10/2024)

Paslon nomor urut 1, Citra Pitriyami dan Ino Darsono, mengusung visi "Melesat" atau "Melanjutkan Lebih Pesat." Visi ini tak terlepas dari dukungan Bupati sebelumnya, yang juga Ketua PDI Perjuangan Pangandaran. Salah satu kebijakan strategis yang digagas adalah pengajuan utang jangka panjang ke perbankan sebesar Rp. 350 Milyar, jika dengan tenor 10 tahun dan cicilan pokok kurang lebih Rp. 35 Milyar per tahun. Asumsi bunga pinjaman sekitar 9%, yang berarti Pangandaran harus menanggung bunga Rp. 28 Milyar per tahun. Kebijakan ini sempat mendapat penolakan keras dari elemen masyarakat, termasuk Presidium Pangandaran yang dipimpin oleh H. Supratman, salah satu tokoh pendiri kabupaten.

Tedi Yusnanda melihat bahwa jika Citra dan Ino memenangkan kontestasi, rencana pengajuan utang besar tersebut kemungkinan besar akan dilanjutkan. Ia menyebut bahwa ini bisa menjadi beban yang berat bagi masyarakat Pangandaran. "Beban utang sebesar itu akan menjadi masalah serius bagi keuangan daerah. Masyarakat perlu mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari kebijakan ini, terutama terkait risiko fiskal yang dihadapi Pangandaran," kata Tedi.

Ia juga menyoroti manuver politik PDI Perjuangan dalam penyusunan Alat Kelengkapan Dewan beberapa waktu lalu, yang tidak memberikan posisi strategis kepada Partai Gerindra meski memiliki lima kursi di DPRD Pangandaran. Menurutnya, hal ini menunjukkan ketegangan politik yang dapat memengaruhi keputusan-keputusan strategis ke depan, termasuk kebijakan fiskal.

Sementara itu, paslon nomor urut 2, Ujang Endin Indrawan dan Dadang Solihat, menawarkan konsep yang berbeda dengan tagline "Hudang," yang berarti bangun atau bangkit. Ujang dan Dadang menolak solusi utang baru sebagai cara mengatasi defisit. Mereka menekankan bahwa akar masalah defisit adalah kebijakan utang sebelumnya, dan solusi yang ditawarkan adalah memaksimalkan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Tedi menilai bahwa strategi pasangan Ujang Endin dan Dadang nampak realistis dan tidak membebani masyarakat. "Dengan keterkaitan politik yang kuat, terutama telah dilantiknya Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra sebagai presiden, garis linear antara pusat, provinsi (red-jika Dedi Mulyadi juga terpilih menjadi Gubernur), dan kabupaten bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki keuangan Pangandaran. Ini berarti, penyelesaian utang dapat ditangani melalui APBD, sementara pembangunan infrastruktur dan program lainnya dapat menggunakan dana pusat dan provinsi," jelas Tedi.

Ia juga menambahkan bahwa strategi ini lebih minim risiko dan dapat meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat serta provinsi terhadap Pangandaran. "Jika pasangan nomor 2 berhasil memaksimalkan program pusat dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah, maka Pangandaran akan lebih stabil secara fiskal tanpa menambah beban masyarakat," tutup Tedi.

Masyarakat Pangandaran kini dihadapkan pada dua pilihan strategi yang sangat berbeda. Baik pilihan utang jangka panjang dari paslon nomor 1 maupun

pendekatan sinergi politik dari paslon nomor 2, akan berdampak signifikan terhadap masa depan keuangan dan pembangunan daerah ini.(JNI)